

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	3
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media : Radar Sampit Halaman : 08

Kompas Kalteng Pos Borneo News

Palangka Post Tabengan ✓

# Belanja Barang dan Jasa Pengaruhi Opini BPK

KUALA KAPUAS - Plt Bupati Kapuas HM Nafiah Iknor menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 pada Rapat Paripurna ke-4 Massa Persidangan III Tahun Sidang 2023, Senin (17/7), di Ruang Rapat DPRD Kapuas. Rapat tersebut juga beragendakan Penetapan SK tentang Perubahan atau Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas No 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy, Ketua DPRD Kapuas Ardiansah beserta anggota DPRD Kapuas dan sejumlah kepala OPD. Dalam penyampaian Plt Bupati Kapuas HM Nafiah Iknor bahwa untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 sebelum dilaporkan

kepada masyarakat melalui DPRD, telah diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemkab mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Opini WDP yang diberikan oleh BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2022 mengalami penurunan satu tingkat jika dibandingkan dengan opini atas laporan keuangan tahun lalu, yaitu wajar tanpa pengecualian. Penurunan opini tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya penyajian realisasi belanja barang dan jasa, belanja modal, penyajian nilai investasi jangka panjang serta penyajian saldo aset tetap yang belum di implementasikan secara optimal sesuai kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Kapuas,” ucap Nafiah.

Lebih lanjut Nafiah berharap bahwa pada Rapat Paripurna ini laporan ini mendapat tanggapan positif dari seluruh anggota dewan yang terhormat. “Pada saatnya nanti secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas dapat bekerja sama membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2022, sesuai tahapan pembahasan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam tata tertib dewan yang terhormat,” tutur Nafiah.

Usai penyampaian tersebut dilakukan penyerahan Naskah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2022 dari Pemkab Kapuas kepada DPRD Kabupaten Kapuas.  hmskmf/c-hr